RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B. 213 /BKPSDM/SET-3/784/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas perencanaan kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperlukan adanya Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4815);
6. Peraturab Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Tahun 2023;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA,

H. RAKHMADI. S.Sos
PEMBINA
NIP. 19660107 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : B. 213 /BKPSDM/SET-3/784/01/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua : Sekretaris
Anggota :

1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
5. Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
6. Beni Siswanto, SE (Analis SDM Aparatur Ahli Muda)
7. Nuryanti, S.Psi (Analis SDM Aparatur Ahli Muda)
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
10. Achmad Solihin, S.Sos, M.Si (Analis SDM Aparatur Ahli Muda)
11. Aji Rifqi Mirza, S.Kom (Analis SDM Aparatur Ahli Muda)
12. Muhammad Rifani, S.Sos (Analis Kepegawaian Ahli Muda)
13. Indah Wahyuniarti, S.Psi (Analis Kepegawaian Ahli Muda)
14. Luthfi Fachruri, S.Kom (Analis Kepegawaian Ahli Muda)
15. Muhd. Irfan Setiawan, SH (Analis SDM Aparatur Ahli Muda)
16. Suherman, SH (Analis Kepegawaian Ahli Pertama)
17. Hariadi Rifani, S.Sos (Analis Kepegawaian Ahli Pertama)
18. Ismail Ependi, S.Sos (Analis Kepegawaian Ahli Pertama)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA,

H. RAKHMADI. S.Sos
PEMBINA
NIP. 19660107 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang memuat Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun ke depan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha–usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Program Dedikasi Kukar IDAMAN.

Tenggarong, 24 Juli 2023

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU**	II-6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	II-6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-27
2.3	Isu –Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	II-32
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2023	II-34
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-42
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM**	III-44
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-44
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	III-47
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM**	IV-49
4.1	Program dan Kegiatan	IV-49
BAB V	**PENUTUP**	V-56

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 BKPSDM	II-16
Tabel II.2	Capaian IKU Tahun 2022	II-26
Tabel TC-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-29
Tabel TC-31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BKPSDM	II-36
Tabel TC-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-43
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	III-48
Tabel TC-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 BKPSDM	IV-52

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran

program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,8201;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen Rancangan Renja Tahun 2024 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2024).

1.3.2 Tujuan :

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2024) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.

d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) Bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.

BAB II

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencapai **100,62%** dengan predikat kinerja **"Sangat Tinggi"** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.238.883.745,00 dari pagu anggaran Rp. 30.446.194.842,00 (86,18%).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi program tahun anggaran 2022 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

   Indikator kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu **"Nilai SAKIP Perangkat Daerah"** target kinerja 85,00 dengan realisasi 84,94 (99,93%).

   Capaian kinerja di atas merupakan capaian kinerja tahun 2021 mengingat hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

   a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
   b. Lemahnya koordinasi antar bidang
   c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual.

   Berkaitan dengan permasalahan di atas, solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan antara lain :

a. Meningkatkan pengembangan kompetensi bagi SDM aparatur di lingkungan BKPSDM melalui diklat, bimtek dan lain-lain terkait perencanaan
b. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan 1 kali)
c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan seperti Srikandi, Sikap Idaman, SIASN, Simpeg dan aplikasi e-office lainnya yang mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 24 dokumen, dengan realisasi 24 dokumen (100,00%)
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja 7 dokumen, dengan realisasi 7 dokumen (100,00%)
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 15 dokumen, dengan realisasi 15 dokumen (100,00%)
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%)
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 15 Laporan, dengan realisasi 15 Laporan (100,00%)
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 2124 orang/bulan, dengan realisasi 2164 orang/bulan (101,88%)
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan (100,00%)
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, target kinerja 12 laporan, dengan realisasi 12 laporan (100,00%)
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%);
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 2 laporan, dengan realisasi 2 laporan (100,00%)
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 50 ASN, dengan realisasi kinerja 50 ASN (100,00%);

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 ASN, dengan realisasi 50 ASN (100,00%)

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%);
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 37 jenis, dengan realisasi 37 jenis (100,00%);
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerj 4500 porsi, realisasi kinerja 4500 porsi (100,00%);
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 317.439 lembar, dengan realisasi 317.439 lembar (100,00%);
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 5 orang/kali, realisasi 5 orang/kali (100,00%)
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 100 orang/kali, realisasi kinerja 100 orang/kali (100,00%);
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 berkas, realisasi 450 berkas (100,00%).

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100,00%, dengan realisasi kinerja 100,00% (100,00%);
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 1 paket, realisasi 1 paket (100,00%);
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 1 paket, realisasi 1 paket (100,00%).

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi kinerja 12 bulan (100,00%);
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%);
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%);
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%); dan
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%).

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 13 unit, dengan realisasi 13 unit (100,00%).

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 12 unit, dengan realisasi 12 unit (100,00%).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, target kinerja 1 unit, dengan realisasi 1 unit (100,00%).

2. Program Kepegawaian Daerah :

Indikator kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah yaitu **"Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara"** target kinerja 92,00% dengan realisasi 89,13% (96,88%). Target kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2021 tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

a. Belum ditetapkannya Anjab dan ABK Tahun berjalan.
b. Dokumen Anjab dan ABK Tahun 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan OPD dan regulasi terbaru.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan antara lain :

a. Koordinasi untuk percepatan penetapan Anjab dan ABK tahun berjalan
b. Menyiapkan data ASN terbaru sebagai dasar penetapan Anjab dan ABK

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, target kinerja 1714 ASN, dengan realisasi 1411 ASN (82,32%).

   Target kinerja untuk Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

   - ❖ Anjab dan ABK tahun berjalan belum ditetapkan;
   - ❖ Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online;
   - ❖ Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap; dan
   - ❖ SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin.

   Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

   - ❖ Koordinasi dengan pihak terkait;

- ❖ Membuat aplikasi pemberhentian secara online;
- ❖ Koordinasi dengan bidang terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin; dan
- ❖ Bimbingan teknis tentang pengelolaan kasus pelanggaran disiplin.

Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 1204 formasi, dengan realisasi 806 formasi (66,94%);

  Faktor penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan ini antara lain :
  - ❖ Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat
  - ❖ Proses penerimaan ASN tahun 2021 yang belum selesai dan menunggu pengumuman kelulusan PPPK Guru Tahap III dari Kemendikbud RI
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 510 SK, dengan realisasi 605 SK (118,63%);

  Target kinerja Sub Kegiatan ini melebihi 100% karena :
  - ❖ Penerapan SAPK BKN secara tepat guna dan tepat waktu;
  - ❖ Proses layanan berbasis online dan papperless; dan
  - ❖ Perkiraan pensiun meninggal dunia yang kurang tepat.
- Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 1142 ASN, dengan realisasi 1128 ASN (98,77%);

  Target kinerja Sub Kegiatan ini tidak tercapai karena :
  - ❖ SOP belum sesuai dengan aplikasi;
  - ❖ SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan; dan
  - ❖ Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar.
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 1 aplikasi, dengan realisasi 1 aplikasi (100,00%);
- Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 2972 data, dengan realisasi 2974 data (100,07%); dan

- Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 73 buku, dengan realisasi 73 buku (100,00%).

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, target kinerja 2890 ASN, dengan realisasi 3286 ASN (113,70%);

Capaian kinerja untuk Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN melebihi target kinerja, antara lain disebabkan :

- ❖ Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, mempermudah proses layanan kenaikan pangkat dan mutasi;
- ❖ Penetapan target kinerja yang terlalu kecil karena perbedaan pemahaman pejabat terdahulu terkait layanan mutasi dan promosi ASN.

Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN melebihi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 460 SK, realisasi 498 SK (108,26%);
- Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 2230 SK, dengan realisasi 2295 SK (102,91%); dan
- Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 200 ASN, dengan realisasi kinerja 493 ASN (246,50%).

  Capaian kinerja sub kegiatan ini jauh melebihi target kinerja yang ditetapkan disebabkan oleh penetapan target kinerja yang terlalu kecil karena perbedaan pemahaman pejabat terdahulu terkait pengertian promosi ASN, dimana promosi ASN hanya terbatas pada promosi pejabat struktural.

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, target kinerja 699 ASN, dengan realisasi 735 ASN (105,15%);

Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN melebihi target kinerja, antara lain disebabkan :

- ❖ Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
- ❖ Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun

Adapun rincian capaian kinerja untuk sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 415 ASN, dengan realisasi 526 ASN (126,75%);
- Pengelolaan Assesment Center, target kinerja 80 ASN, dengan realisasi 99 ASN (123,75%);
- Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 204 ASN, dengan realisasi 110 ASN (53,92%);

  Capaian kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan, antara lain disebabkan oleh :

  - ❖ Penyusunan data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa
  - ❖ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman tidak memuat tentang PNS penerima Beasiswa Tematik
  - ❖ Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN

  Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

  - ❖ Melakukan validasi data dan sosialisasi lebih awal terhadap Calon Penerima Beasiswa
  - ❖ Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman
  - ❖ Membuat Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang sesuai pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%).

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 13084 ASN, dengan realisasi 11443 ASN (87,46%)

   Target kinerja untuk Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

   - ❖ Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) masih rendah;

- ❖ Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan tersebut
- ❖ Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah.

Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

- ❖ Peraturan terkait pelaporan prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil hendaknya tidak berubah tiap tahun sebagaimana yang terjadi pada PerMenPAN & RB 8 tahun 2021 dan PerMenPAN & RB 6 tahun 2022
- ❖ Perlunya Ketegasan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai yang tidak menyampaikan PPK PNS pada BKPSDM.
- ❖ Perlu diadakan bimbingan secara berkelanjutan pada manajemen kinerja khususnya terhadap penyusunan SKP.

Capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 13084 ASN, dengan realisasi 11443 ASN (87,46%);
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 348 PNS, dengan realisasi kinerja 365 PNS (104,89%);
- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 15 kasus, dengan realisasi kinerja 5 kasus (33,33%).

  Capaian kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan penyelesaian pelanggaran ASN tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan, antara lain disebabkan oleh :

  - ❖ Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet

- ❖ Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal

Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

- ❖ Aplikasi kedisiplinan kepegawaian perlu di upgrade / dikembangkan sesuai indikatot- indikator kedisiplinan sebagaiman tertuang dalam ketentuan / peraturan yang berlaku dan ketersediaan jaringan internet bagi daerah terpencil agar diperioritaskan oleh Dikominfo
- ❖ Pemerintah daerah perlu tegas dalam menindak/memberikan hukuman disiplin bagi pegawai yang secara nyata terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin.

- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 35 izin, dengan realisasi kinerja 43 izin (122,86%)

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **"Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional"** target kinerja 18,38% dengan realisasi 22,76% (123,83%).

Capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja program ini antara lain :

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun
c. Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg, SIASN)

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, target kinerja 210 ASN, dengan realisasi 212 ASN (100,95%)
   - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren,

perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 210 ASN, dengan realisasi 212 ASN (100,95%).

b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, target kinerja 130 ASN, dengan realisasi 229 ASN (176,15%)

   Capaian kinerja kegiatan ini jauh melebihi target kinerja karena adanya kesalahan penetapan kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dimana adanya pergeseran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator menjadi Pelatihan Fungsional tidak diikuti perubahan target kinerja.

   - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 130 ASN, dengan realisasi 229 ASN (176,15%)

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 pada tabel II.1 (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)		
										Target Renja-PD Tahun (2022)		Realisasi Renja-PD Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
4	05																		
4	05	01		**UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN**															
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Sakip**	**89**	**Nilai**	**75,89**	**Nilai**	**85**	**Nilai**	**84,94**	**Nilai**	**99,93%**	**86**	**Nilai**	**84,94**	**Nilai**	**95,44%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**227**	**Dokumen**	**129**	**Dokumen**	**24**	**Dokumen**	**24**	**Dokumen**	**100,00%**	**19**	**Dokumen**	**172**	**Dokumen**	**75,77%**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64	Dokumen	35	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00%	7	Dokumen	49	Dokumen	76,56%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150	Laporan	91	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	15	Laporan	121	Laporan	80,67%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00%	2	Laporan	7	Laporan	53,85%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**164**	**Laporan**	**101**	**Laporan**	**15**	**Laporan**	**15**	**Laporan**	**100,00%**	**15**	**Laporan**	**131**	**Laporan**	**79,88%**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11880	orang/bulan	7515	orang/bulan	2124	orang/bulan	2164	orang/bulan	101,88%	1800	orang/bulan	11479	orang/bulan	96,62%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	8	Laporan	80,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	96	Laporan	80,00%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**20**	**Dokumen**	**11**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**100,00%**	**2**	**Dokumen**	**15**	**Dokumen**	**75,00%**
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Laporan	11	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00%	2	Laporan	15	Laporan	75,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**13**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**100,00%**	**1**	**Dokumen**	**7**	**Dokumen**	**53,85%**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	417	Paket	117	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%	1	Paket	118	Paket	28,30%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280	Orang	70	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00%	50	Orang	170	Orang	60,71%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**46**	**Layanan**	**15**	**Layanan**	**6**	**Layanan**	**6**	**Layanan**	**100,00%**	**7**	**Layanan**	**28**	**Layanan**	**60,87%**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	3	Paket	60,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	6	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00%	3	Paket	12	Paket	66,67%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	6	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00%	3	Paket	12	Paket	66,67%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40889	Dokumen	37356	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	1277	Dokumen	38633	Dokumen	94,48%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35	Laporan	14	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00%	1	Laporan	20	Laporan	57,14%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1554	Laporan	1154	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100,00%	1	Laporan	1255	Laporan	80,76%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3250	Dokumen	1450	Dokumen	450	Dokumen	450	Dokumen	100,00%	450	Dokumen	2350	Dokumen	72,31%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100,00%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100,00%**

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	7	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	31	Unit	39	Unit	390,00%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	6	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	15	Unit	22	Unit	244,44%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100,00%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100,00%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	8	Laporan	80,00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	8	Laporan	80,00%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	8	Laporan	80,00%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	8	Laporan	80,00%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**101**	**Unit**	**57**	**Unit**	**12**	**Unit**	**12**	**Unit**	**100,00%**	**12**	**Unit**	**81**	**Unit**	**80,20%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101	Unit	57	Unit	12	Unit	12	Unit	100,00%	12	Unit	81	Unit	80,20%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%		Unit	1	Unit	
				Program Kepegawaian Daerah	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara**	96	Persen	91,5	Persen	92,00	Persen	89,13	Persen	**96,88%**	**92**	Persen	**89,13**	Persen	**95,84%**
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan**	**7545**	**ASN**	**2052**	**ASN**	**1714**	**ASN**	**1411**	**ASN**	**82,32%**	**1147**	**ASN**	**4610**	**ASN**	**61,10%**
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	8	Dokumen	80,00%
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	7	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	4	Dokumen	57,14%
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	7	Dokumen	66,67%
				Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7	Lembaga	2	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100,00%	1	Lembaga	4	Lembaga	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	0	Dokumen	4	Dokumen	80,00%

				Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	7	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	4	Dokumen	57,14%
				Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	4	Laporan	57,14%
				Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan**	**15779**	**ASN**	**10653**	**ASN**	**2890**	**ASN**	**3286**	**ASN**	**113,70%**	**2928**	**ASN**	**16867**	**ASN**	**106,90%**
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	7	Dokumen	70,00%
				Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	7	Dokumen	70,00%
				Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	7	Dokumen	70,00%
				Pengembangan kompetensi ASN	**Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi**	**3080**	**ASN**	**1002**	**ASN**	**699**	**ASN**	**735**	**ASN**	**105,15%**	**734**	**ASN**	**2471**	**ASN**	**80,23%**
				Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1785	Orang	497	Orang	415	Orang	526	Orang	126,75%	470	Orang	1493	Orang	83,64%
				Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	9	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	6	Dokumen	66,67%
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%		Dokumen	1	Dokumen	
				Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	563	Orang	76	Orang	204	Orang	110	Orang	53,92%	184	Orang	370	Orang	65,72%
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya**	**73643**	**ASN**	**24952**	**ASN**	**13084**	**ASN**	**11443**	**ASN**	**87,46%**	**12607**	**ASN**	**49002**	**ASN**	**66,54%**
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	3	Dokumen	60,00%
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	7	Dokumen	70,00%
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	7	Laporan	70,00%
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1740	Orang	n/a	Orang	348	Orang	365	Orang	104,89%	348	Orang	713	Orang	40,98%
				Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	147	Laporan	72	Laporan	15	Laporan	5	Laporan	33,33%	15	Laporan	92	Laporan	62,59%
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5	Dokumen	n/a	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,00%

				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																**0,00%**
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional**	**26,64**	**Persen**	**17,22**	**Persen**	**18,38**	**Persen**	**22,76**	**Persen**	**123,83%**	**20,65**	**Persen**	**22,76**	**Persen**	**85,44%**
				Pengembangan kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis**	**2496**	**ASN**	**1766**	**ASN**	**210**	**ASN**	**212**	**ASN**	**100,95%**	**370**	**ASN**	**2348**	**ASN**	**94,07%**
				Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2496	Orang	1766	Orang	210	Orang	212	Orang	100,95%	370	Orang	2348	Orang	94,07%
				Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**1245**	**ASN**	**794**	**ASN**	**130**	**ASN**	**229**	**ASN**	**176,15%**	**413**	**ASN**	**1436**	**ASN**	**115,34%**
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	47	orang	16	orang	0	orang	0	orang	0,00%	13	orang	29	orang	61,70%
				Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	5	Laporan	11	Laporan	110,00%

2.1.1 Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (99,93%)
b. Program Kepegawaian Daerah (96,88%)

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (82,32%)
b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (87,46%)

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (66,94%)
b. Fasilitasi lembaga profesi ASN (98,77%)
c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN (53,92%)
d. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (87,46%)
e. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (33,33%)

2.1.2 Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
k. Fasilitasi Kunjungan Tamu
l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
m. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
t. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
v. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
w. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
x. Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
y. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
z. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
aa. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.1.3 Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (123,83%)

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Mutasi dan Promosi ASN (113,70%)
b. Pengembangan Kompetensi ASN (105,15)
c. Pengembangan kompetensi Teknis (100,95)
d. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (176,15%)

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (101,88%)
b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN (118,63%)
c. Pengelolaan data Kepegawaian (100,07%)
d. Pengelolaan Mutasi ASN (108,26%)
e. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN (102,91%)
f. Pengelolaan promosi ASN (246,50%)
g. Peningkatan kapasitas kinerja ASN (126,75%)
h. Pengelolaan Assesment Center (123,75%)
i. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai (104,89%)
j. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (122,86%)
k. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum (100,95%)
l. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan (176,15%)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Lemahnya koordinasi antar bidang;
c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
d. Belum ditetapkannya Anjab dan ABK Tahun berjalan.

e. Dokumen Anjab dan ABK Tahun 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan OPD dan regulasi terbaru.
f. Anjab dan ABK tahun berjalan belum ditetapkan
g. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online
h. Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap
i. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin
j. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
k. Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan.
l. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah
m. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat
n. Proses penerimaan ASN tahun 2021 yang belum selesai dan menunggu pengumuman kelulusan PPPK Guru Tahap III dari Kemendikbud RI
o. SOP belum sesuai dengan aplikasi
p. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan
q. Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar
r. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa
s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman tidak memuat tentang PNS penerima Beasiswa Tematik
t. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
u. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet
v. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (e-RPJMD, SIPD, SIMDA Keuangan, e-Pantau);

b. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
c. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
d. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI

Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
c. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
d. Penerapan SAPK BKN secara tepat guna dan tepat waktu;
e. Proses layanan berbasis online dan papperless;
f. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, yang berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
g. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
h. Tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian; dan
i. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 dan rencana kerja perubahan tahun 2022.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Untuk capaian sasaran strategis tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Capaian IKU Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2021			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	85	83,5	98,24	80	76,33	95,41	Menurun
Rata-rata Capaian Kinerja						80	76,33	95,41	

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan BKD Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat terkait waktu penyelesaian dokumen kepegawaian;
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/ASN tentang prosedur layanan serta seluruh layanan BKPSDM tidak dipungut biaya;
3. Kurangnya respon atas pengaduan, saran dan masukan;
4. Dominan faktor penghambat pada unsur waktu pelayanan, Biaya/tarif dan Pengaduan, saran dan masukan;
5. Capaian 76,33 tergolong dalam kategori kurang baik, selisih 0,28 sudah masuk ke kategori baik;
6. Belum ada ketegasan dari pimpinan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin;
7. Perubahan regulasi proses layanan kepegawaian terutama terkait dokumen kelengkapan penerbitan sk;
8. Perubahan aplikasi layanan kepegawaian dari SAPK ke SIASN;
9. Kurang optimalnya pemahaman pemberi layanan terhadap SOP layanan;

10. Terlalu banyak aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang datanya tidak sinkron; dan
11. Kurangnya koordinasi antar bidang.

Alternatif solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan BKD Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat;
2. Sosialisasi kepada ASN tentang prosedur layanan BKPSDM;
3. Membentuk PIC yang bertanggungjawab menangani pengaduan, saran dan masukan;
4. Surat edaran dari Kepala BKPSDM tentang pelanggaran disiplin ASN;
5. Melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi sesuai regulasi terbaru;
6. Memberikan pemahaman kepada seluruh ASN di BKPSDM terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang;
7. Perlunya aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang standar dan dibuatkan dasar hukumnya;
8. Ketegasan perlakuan jika data ASN pada aplikasi pengelolaan data kepegawaian tidak lengkap;
9. Pelaksanaan survei secara online/elektronik; dan
10. Membangun website BKPSDM.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.3 (T-C.30) berikut:

Tabel II.3 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Tujuan BKPSDM												
1.	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	40,45	42,45	65	70	Kinerja belum mencapai target
	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat *Impact*												
1.	Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			80	82	85	87	89	83,50	76,33	82	85	Kinerja belum mencapai target
	Indikator Kinerja Kunci												
1			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	84	86	88	90	36.94	46,68	84	86	Kinerja belum mencapai target
2			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16	18	20	55	24	11.87	10,51	18	20	Kinerja belum mencapai target
3			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5	7	9	11	13	12,96	37,84	7	9	Target kinerja tercapai
	Indikator Kinerja Program setingkat *Outcome*												
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	75,89	84,94	86	87	Kinerja belum mencapai target
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	91,50	89,13	93	94	Kinerja belum mencapai target
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	17,22	22,76	24,76	26,76	Target kinerja tercapai

	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19	24	19	19	Target kinerja tercapai
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12	15	15	3	Target kinerja tercapai
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1	2	2	2	Target kinerja tercapai
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1	1	2	2	Target kinerja tercapai
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7	6	7	7	Target kinerja tercapai
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target kinerja tercapai
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Target kinerja tercapai
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16	13	12	12	Target kinerja tercapai
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645	1411	1147	1365	Target kinerja tercapai
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8143	3286	2928	2495	Target kinerja tercapai
11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322	735	560	560	Target kinerja tercapai
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11438	11443	12607	11491	Kinerja belum mencapai target
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280	212	200	200	Target kinerja tercapai
14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116	229	122	106	Target kinerja tercapai

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara”

   Capaian tujuan Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 69,59% dengan predikat “Rendah”, dimana target pada tahun 2022 sebesar 61,00 terealisasi sebesar 42,45.

   Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

   a. Masih terdapat 5.145 PNS Kabupaten Kutai Kartanegara yang pendidikannya di bawah S.1;
   b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS belum maksimal; dan
   c. Data kualifikasi, pengembangan kompetensi dan kinerja PNS belum seluruhnya diupdate ke SAPK

2. Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah”

   Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM” sebesar 95,41% dengan predikat “Sangat Tinggi”, dimana target pada tahun 2022 sebesar 80,00 terealisasi sebesar 76,33. Target kinerja Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

   a. Belum optimalnya koordinasi dengan BKD Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat terkait waktu penyelesaian dokumen kepegawaian;
   b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/ASN tentang prosedur layanan serta seluruh layanan BKPSDM tidak dipungut biaya;
   c. Kurangnya respon atas pengaduan, saran dan masukan;
   d. Dominan faktor penghambat pada unsur waktu pelayanan, biaya/tarif dan pengaduan, saran dan masukan;
   e. Capaian 76,33 tergolong dalam kategori kurang baik, selisih 0,28 sudah masuk ke kategori baik
   f. Belum ada ketegasan dari pimpinan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin;
   g. Perubahan regulasi proses layanan kepegawaian terutama terkait dokumen kelengkapan penerbitan Surat Keputusan;
   h. Perubahan aplikasi layanan kepegawaian dari SAPK ke SIASN;
   i. Kurang optimalnya pemahaman pemberi layanan terhadap SOP layanan;

j. Terlalu banyak aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang datanya tidak sinkron; dan
k. Kurangnya koordinasi antar bidang.

2.3 Isu –Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, tingkat kinerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara. Meskipun terdapat beberapa tantangan, upaya perbaikan yang dilakukan telah menghasilkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh seluruh ASN. Harapannya, upaya-upaya ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Faktor-faktor pendorong meningkatnya kinerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

a. Pembenahan proses dan sistem.
b. Penerapan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian antara lain melalui SIMPEG Kukar, SIASN, SimGaji.
c. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan program pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan manajerial.
d. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan bagi BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, antara lain :

a. Belum optimalnya penilaian kinerja dan pembinaan disiplin ASN;
b. Belum optimalnya data dan informasi kepegawaian;
c. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian; dan
d. Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara termasuk salah satu perangkat daerah yang mengampu misi 1 “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani” dengan sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Meningkatnya capaian kinerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara secara langsung memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam menjalankan tupoksi kepegawaian, maka BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan, yaitu:

a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
b. Tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan peningkatan profesionalisme pegawai;
c. Keinginan masyarakat agar pelayanan publik ditingkatkan secara lebih maksimal yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;
d. Tantangan pembenahan pengelolaan Tenaga Non PNS;
e. Pegawai yang tidak mempunyai keahlian khusus (skill) menjadi hambatan dalam memberdayakan pegawai di sektor-sektor teknis fungsional; dan
f. Belum terbangunnya komitmen bersama yang kuat dari penyelenggara pemerintah daerah.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

a. Adanya agenda nasional reformasi birokrasi secara nasional merupakan peluang emas dan momentum yang tepat untuk membenahi meningkatkan proesionalisme aparatur daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan;
b. Adanya perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi kepegawaian, antara lain melalui aplikas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi e-Kinerja dan Sistem Informasi Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Kutai Kartanegara; dan
c. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan kualitas sumber daya ASN Kab. Kutai Kartanegara.

2.3.5 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian

yaitu:

a. Belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai untuk menentukan formasi dan penataan pegawai pada unit organisasi;
b. Belum maksimalnya pengelolaan informasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian yang belum cepat dan tepat;
d. Optimalisasi analisis pengembangan karier dan promosi serta mutasi sebagai panduan /kejelasan jenjang karir ASN;
e. Optimalisasi Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan peningkatan kompetensi ASN;
f. Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN;
g. Kesenjangan Kompetensi;
h. Belum adanya pola penilaian kinerja yang didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu, tingkat unit dan organisasi yang jelas (target, sasaran, hasil dan manfaat serta perilaku dari ASN secara terukur, akuntabel dan transparan);
i. Belum optimalnya pemberian reward dan punishment;
j. Penanganan penegakkan disiplin pegawai belum optimal karena membutuhkan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam melaporkan pelanggaran disiplin di tempat kerja masing-masing;
k. Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara; dan
l. Sarana dan prasarana BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara yang belum representatif.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2024

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Sebagaimana Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel TC-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN					**UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**87 Nilai**	**13.792.806.535,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**87 Nilai**	**16.614.206.342,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**	**185.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**210.000.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	55.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	65.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	90.000.000,00	Penambahan pagu utk 2 kali pelaksanaan Survei IKM, dan Reviu Awal Renstra Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	10.494.641.295,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	13.573.766.102,00	

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080	orang/bulan	10.344.641.295,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190	orang/bulan	13.428.766.102,00	Penyesuaian kebutuhan riil setelah penataan PNS eks. Set KORPRI dan Dinas ESDM
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	95.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	2	Dokumen	45.000.000,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	2	Dokumen	44.840.000,00	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	45.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	44.840.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	2	Dokumen	100.000.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	2	Dokumen	100.000.000,00	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket		Pengadaan Pakaian Olah Raga dialihkan ke APBDP Tahun 2023
9	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	50.000.000,00	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	7	Layanan	1.136.000.000,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	8	Layanan	1.265.000.000,00	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	200.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	200.000.000,00	

14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277	Dokumen	21.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	
15	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	75.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	150.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil untuk Pameran Merah Putih Sanga Sanga dan Erau 2024
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	125.000.000,00	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	315.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	315.000.000,00	
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Dokumen	100.000.000,00	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	75.000.000,00	Pengembangan dan pengelolaan Website BKPSDM untuk menunjang SPBE
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	387.750.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100.000.000,00	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	Unit	287.750.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit		Pengadaan PC, Laptop Video Wall utk Ruang CAT dan Ruang Rapat serta Pengadaan Server utk SIMPEG dialihkan ke APBDP Tahun 2023
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1.119.415.240,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	995.600.240,00	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.000.000,00	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	170.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	123.835.000,00	Penyesuaian tarif pembayaran Indihome
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	167.350.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil

25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	827.415.240,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	682.415.240,00	Distribusi THL Eks. Set. KORPRI dan Dinas ESDM ke OPD lain
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12	Unit	325.000.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Barang Milik Daerah	15	Unit	325.000.000,00	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	325.000.000,00	
	Program Kepegawaian Daerah		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara**	94	Persen	3.565.000.000,00	**Program Kepegawaian Daerah**		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara**	94	Persen	12.397.611.000,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan**	1262	ASN	1.325.000.000,00	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan**	1262	ASN	1.766.550.000,00	
27	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	75.000.000,00	
28	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	450.000.000,00	
29	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	100.000.000,00	
30	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	500.000.000,00	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	500.000.000,00	Program Aparatur Negara Bahagia
31	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	441.550.000,00	Pengembangan SIMPEG yang terintegrasi dengan Aplikasi SIASN BKN Pusat dan Sewa Hosting untuk SIMPEG
32	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	100.000.000,00	
33	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	100.000.000,00	
	Mutasi dan Promosi ASN		**Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan**	2583	ASN	625.000.000,00	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan**	2583	ASN	625.000.000,00	
34	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	225.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	225.000.000,00	Program Disapa

35	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	
36	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi ASN		**Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi**	560	ASN	1.075.000.000,00	**Pengembangan kompetensi ASN**		**Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi**	1826	ASN	9.466.061.000,00	
37	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	380	Orang	350.000.000,00	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	240	Orang	1.250.000.000,00	Perubahan biaya bimtek bidang pertanian, ASN Kecamatan/Kelurahan dan Pejabat Fungsional (Mandatory Spending)
38	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	350.000.000,00	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3	Dokumen	2.250.000.000,00	Pelaksanaan Assesment bagi 479 Pejabat terdiri dari 25 Pejabat Ess II, 224 Pejabat Ess III dan 230 Pejabat Ess IV (Mandatory Spending)
39	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	375.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1107	Orang	5.966.061.000,00	Penambahan Beasiswa skema tematik 10 orang @ Rp. 8.500.000,00 sejumlah Rp. 85.000.000,00 dan 1000 orang guru dari Disdikbud sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Mandatory Spending)
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya**	12093	ASN	540.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya**	12093	ASN	540.000.000,00	
40	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	100.000.000,00	
41	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	125.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	125.000.000,00	
42	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	75.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	75.000.000,00	
43	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	Orang	90.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	Orang	90.000.000,00	
44	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	100.000.000,00	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	100.000.000,00	
45	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35	Dokumen	50.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35	Dokumen	50.000.000,00	

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional**	22,64 Persen	2.130.000.000,00	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional**	26,76 Persen	5.779.568.000,00	
	Pengembangan kompetensi Teknis		**Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis**	200 ASN	400.000.000,00	**Pengembangan kompetensi Teknis**		**Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis**	393 ASN	2.027.470.000,00	
46	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	400.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	393 Orang	2.027.470.000,00	Penambahan pagu untuk mandatory spending pengembangan SDM terdiri dari Pelatihan Okupasi PPPK (30 orang), Pelatihan PBJ Level 1 (25 orang), Pelatihan Teknologi Informasi (150 orang), Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat/Lurah (15 orang), Pelatihan Pariwisata (86 orang), Pelatihan Tata Naskah Dinas (30 orang), Pelatihan Bendaharawan (34 orang) dan Peningkatan Kompetensi Fungsional Arsiparis dan Pustakawan (23 orang) (Mandatory Spending)
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	122 ASN	1.730.000.000,00	**Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**		**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	165 ASN	3.752.098.000,00	
47	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 orang	230.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 orang	230.000.000,00	Mandatory Spending
48	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.500.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.522.098.000,00	Penambahan pagu untuk mandatory spending pengembangan SDM terdiri dari : Pelatihan Kepemimpinan Nasional (3 orang), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (40 orang), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (40 orang) dan Pelatihan Fungsional (70 orang) (Mandatory Spending)
	JUMLAH				**19.487.806.535,00**					**34.791.385.342,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024, terdapat 2 (dua) usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II-5 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1000 Orang	a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 251 orang b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 130 orang c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (PAUD) sebanyak 619 orang
2			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Instansi Pembina	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	23 orang	Peningkatan Kompetensi Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

BAB III

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dearah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong**

Royong" dan misi "**Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**". Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*;
b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

a. Penguatan implementasi manajemen ASN;
b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
d. Transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan oleh BKN adalah **"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"** untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2026 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah "**Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten;
c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program

pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi "**Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional**" yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

a. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
b. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
c. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1(satu) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran

adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran renja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN		TARGET RENJA TAHUN 2024
	URAIAN	INDIKATOR	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara		Indeks Profesionalitas ASN	70
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	85

BAB IV

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu pada misi pertama “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”.
2. Pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.
4. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM berbasis sistem merit.
5. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 34.791.385.342,00.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam program dedikasi KUKAR IDAMAN. Dalam upaya mendukung program dedikasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program Aparatur Negara Bahagia dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik serta mendukung Program Kukar Lumbung Pangan Kaltim.

Program Aparatur Negara Bahagia merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN

KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT. Dalam program ini BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk merevitalisasi Koperasi ASN Panca Prasetya dan memastikan keberadaan koperasi ASN eksis, aktif dan produktif di seluruh Kab. Kutai Kartanegara.

BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga diberi amanat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam program ini peranan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk kesuksesan Program Disapa serta menempatkan aparatur sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mendukung Program Kukar Lumbung Pangan Kaltim, pada tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan memfasilitasi pengembangan kompetensi aparatur bidang pertanian sesuai kebutuhan dan prioritas anggaran yaitu untuk 150 ASN bidang pertanian.

Program dan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis dengan skala prioritas agar tujuan dan sasaran strategis dapat diwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan upaya, kerja keras dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, mengingat saat ini nilai indeks profesionalitas ASN masih sangat rendah. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM telah tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun.

Pada Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024 ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rancangan awal disebabkan antara lain tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 serta pemenuhan Mandatory Spending peningkatan kompetensi sumber daya manusia (minimal 0,16% dari belanja daerah). Akibat adanya faktor-faktor tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan penyesuaian terhadap rancanga awal yang telah disusun sebelumnya.

Meskipun demikian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tetap menjaga komitmen terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun ada perubahan/penyesuaian kebutuhan dalam rencana kerja, namun tujuan akhir yang ingin dicapai tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara. Dengan melakukan penyesuaian yang bijaksana dan

tetap berpegang pada komitmen, diharapkan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan publik pada tahun 2024.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegera dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut :

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN										
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**87**	**Nilai**	**16.614.206.342,00**			**88**	**Nilai**	**13.932.806.535,00**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		10	**Dokumen**	**210.000.000,00**			**23**	**dokumen**	**185.000.000,00**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	3	Dokumen	65.000.000,00	APBD		6	Dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	5	Laporan	55.000.000,00	APBD		15	Laporan	55.000.000,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	2	Laporan	90.000.000,00	APBD		2	Laporan	65.000.000,00
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		3	Laporan	13.573.766.102,00			15	Laporan	10.494.641.295,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	1190	orang/bulan	13.428.766.102,00	APBD		1080	orang/bulan	10.344.641.295,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	50.000.000,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	12	Laporan	95.000.000,00	APBD	-	12	Laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2	Dokumen	44.840.000,00			2	dokumen	45.000.000,00
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2	Laporan	44.840.000,00	APBD		2	Laporan	45.000.000,00
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2	Dokumen	100.000.000,00			2	Dokumen	240.000.000,00
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kukar	1	Paket	-	APBD		1	Paket	140.000.000,00
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar	30	Orang	50.000.000,00	APBD		30	Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	50	Orang	50.000.000,00	APBD		50	Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8	Layanan	1.265.000.000,00			7	Layanan	1.136.000.000,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1	Paket	150.000.000,00	APBD		1	Paket	150.000.000,00

5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	150.000.000,00	APBD		3	Paket	150.000.000,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	200.000.000,00	APBD		3	Paket	200.000.000,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kukar	0	Dokumen	-	APBD		1277	Dokumen	21.000.000,00
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar	2	Paket	150.000.000,00			2	Paket	75.000.000,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	1	Laporan	125.000.000,00	APBD		1	Laporan	125.000.000,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	315.000.000,00	APBD		1	Laporan	315.000.000,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	450	Dokumen	100.000.000,00	APBD		450	Dokumen	100.000.000,00
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	1	Dokumen	75.000.000,00	APBD		0	-	-
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	100.000.000,00			100	Persen	387.750.000,00
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	42	Unit	-	APBD		24	Unit	287.750.000,00
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	6	Unit	100.000.000,00	APBD		6	Unit	100.000.000,00
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	995.600.240,00			12	Bulan	1.119.415.240,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	1	Laporan	22.000.000,00	APBD		1	Laporan	22.000.000,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar	12	Laporan	123.835.000,00	APBD		1	Laporan	170.000.000,00
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1	Laporan	167.350.000,00	APBD		1	Laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	12	Laporan	682.415.240,00	APBD		1	Laporan	827.415.240,00
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah		15	Unit	325.000.000,00			12	Unit	325.000.000,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar	15	Unit	325.000.000,00	APBD		12	Unit	325.000.000,00
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara		94	Persen	12.397.611.000,00			95	Persen	3.315.000.000,00
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan		1262	ASN	1.766.550.000,00			1365	ASN	1.425.000.000,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	1	Dokumen	75.000.000,00	APBD		1	Dokumen	75.000.000,00

5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	1	Dokumen	450.000.000,00	APBD		1	Dokumen	450.000.000,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kukar	1	Lembaga	500.000.000,00	APBD	Program Aparatur Negara Bahagia	1	Lembaga	500.000.000,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	2	Dokumen	441.550.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1	Laporan	100.000.000,00	APBD		1	Laporan	100.000.000,00
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan		2583	ASN	625.000.000,00			2495	ASN	525.000.000,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kukar	1	Dokumen	225.000.000,00	APBD	Program Disapa	1	Dokumen	125.000.000,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		1	Dokumen	200.000.000,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		1	Dokumen	200.000.000,00
5.03.02.2.03	**Pengembangan kompetensi ASN**	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		1826	ASN	9.466.061.000,00			560	ASN	825.000.000,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kukar	240	Orang	1.250.000.000,00	APBD	Program Disapa/ Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	380	Orang	100.000.000,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	3	Dokumen	2.250.000.000,00	APBD	Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	1	Dokumen	350.000.000,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kukar	1107	Orang	5.966.061.000,00	APBD	Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	100	Orang	375.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		12093	ASN	540.000.000,00			11491	ASN	540.000.000,00
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Dokumen	125.000.000,00	APBD		1	Dokumen	125.000.000,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Laporan	75.000.000,00	APBD		1	Laporan	75.000.000,00
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kukar	348	Orang	90.000.000,00	APBD		348	Orang	90.000.000,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kukar	1	Laporan	100.000.000,00	APBD		1	Laporan	100.000.000,00
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kukar	35	Dokumen	50.000.000,00	APBD		35	Dokumen	50.000.000,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		26,76	Persen	5.779.568.000,00			24,64	Persen	2.030.000.000,00

5.04.02.2.01	**Pengembangan kompetensi Teknis**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis		393	ASN	2.027.470.000,00			200	ASN	400.000.000,00
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kukar	393	Orang	2.027.470.000,00	APBD	Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	200	Orang	400.000.000,00
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		165	ASN	3.752.098.000,00			106	ASN	1.630.000.000,00
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	12	orang	230.000.000,00	APBD	Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	6	orang	130.000.000,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kukar	4	Laporan	3.522.098.000,00	APBD	Mandatory Spending Pengembangan SDM Aparatur	1	Laporan	1.500.000.000,00
	JUMLAH					**34.791.385.342,00**					**19.277.806.535,00**

BAB V

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kab. Kukar.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pencapaian Visi dan Misi Daerah dapat terwujud dengan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, maka unsur-unsur organisasi mulai dari Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

3. Melaksanakan Renja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
4. Menjaga konsistensi antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kutai Kartanegara, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, 24 Juli 2023
Kepala BKPSDM Kab. Kukar

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003